

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi sekarang ini, hampir semua orang ingin mendapatkan kehidupan yang layak serta memiliki perekonomian yang cukup untuk diri sendiri, pasangan hidup, dan keluarganya kelak. Hal ini yang memicu persaingan antar-manusia mulai dari pengusaha, wiraswasta, serta para pedagang untuk mendapatkan uang banyak. Uang itulah yang mampu membuat sebagian orang harus melakukan berbagai cara untuk kelayakan hidupnya. Salah satu contoh yang sedang diperdebatkan sekarang ini yaitu usaha yang dilakukan oleh PKL.

Keberadaan pedagang kaki lima di perkotaan mampu menjadi magnet atau contoh bagi para perantau untuk membuat lapangan pekerjaan baru. Banyak orang menjadikan pedagang kaki lima sebagai pilihan alternatif bagi yang tidak tertampung di sektor formal. Jadi keterlibatan dalam sektor informal lebih diakibatkan karena keterpaksaan saja dibanding sebagai pilihan, hal ini terjadi karena tekanan dari sistem ekonomi yang tidak memberi tempat bagi mereka yang tidak mempunyai pendidikan dan ketrampilan yang mencukupi.

Sektor informal (PKL) menjadi pilihan alternatif, karena mudah memasukinya, tidak perlu ketrampilan khusus, serta pasar yang kompetitif (seperti pada definisi sektor informal oleh ILO), sehingga hal ini dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Sektor informal terus berkembang dalam menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung pada sektor formal, hal ini dikemukakan Ginting (2004).

Hal yang dilakukan oleh pedagang tersebut sebenarnya memiliki dampak yang baik jika dilakukan sesuai dengan prosedur negara yang memang sudah ditetapkan. Tetapi hal tersebut akan berubah menjadi dampak yang tidak baik (negatif) jika tidak dilakukan secara terang-terangan atau bisa dibilang tidak sesuai dengan prosedur yang telah dibuat dan ditetapkan oleh negara. Inilah yang menjadi persoalan untuk para pedagang dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Keberadaan PKL di Kota Surakarta juga menjadi dilema bagi pemerintah kota. Jumlah pedagang kaki lima di Kota Surakarta meningkat dari tahun ke tahun. Data dari Kantor PKL Surakarta menyebutkan jika tahun 2003 tercatat hanya 3.834 PKL, hasil pendataan pada akhir 2005 meningkat 51,7 persen menjadi 5.817 PKL. Pada tahun 2007 jumlah PKL turun menjadi 3.917 dan pada tahun 2010 menurun lagi jumlahnya menjadi 2014. Penurunan jumlah PKL ini disebabkan oleh keberhasilan Pemkot Solo dalam menata PKL (Yuliani, 2012).

Keberhasilan Pemkot Solo dalam penataan PKL inilah yang dilakukan tidak lepas dari bantuan aparat penegak hukum. Salah satunya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Mereka selalu siap sedia dalam membantu menegakkan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Tugas dan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tidak ringan, karena harus menyelaraskan aparat, masyarakat dan peraturan yang berlaku.

Upaya penertiban pun sering kali mendapat penolakan bahkan perlawanan dari PKL. Para Satpol PP berusaha mengosongkan lahan pemerintah dari PKL

dengan mendorong PKL dan mengangkat gerobak secara arogan tanpa ada komunikasi terlebih dahulu (Oki, 2016). Tentu dalam kasus ini tidak bisa hanya menyalahkan anggota Satpol PP yang bertugas di lapangan, tetapi juga harus melihat bagaimana pemimpin Satpol PP itu sendiri dalam memberi perintah.

Kini, masa kepemimpinan Jokowi, konsep yang disuguhkan oleh organisasi Satpol PP berbeda. Organisasi ini lebih mengusung konsep persuasif dalam menertibkan masyarakat khususnya para pedagang kaki lima (dalam Kristanty, 2013). Satpol PP merupakan aparat pemerintah yang bertugas mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Tugas menentramkan dan menertibkan masyarakat yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 5, Pedoman Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Nomor 41 Tahun 2011.

Berapa data menunjukkan petugas Satpol PP identik dengan perilaku yang tidak humanis dalam menjalankan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menertibkan masyarakat. Oleh karena itu, aparat Satpol PP harus dibekali dengan keterampilan dan kemampuan teknis agar mampu mengomunikasikan peraturan yang berlaku kepada masyarakat, dalam hal ini berguna agar warga dapat memahami dan menaati (Ismaji, 2009).

Cara-cara itulah yang membuat Satpol PP lebih bisa mengarahkan masyarakat khususnya PKL untuk memahami dan bahkan berusaha menaati peraturan yang telah ditetapkan. Sesuai yang di lansir oleh (Antara, 2015) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota berupaya tampil lebih humanis dalam menjalankan tugasnya menegakkan peraturan daerah dengan menambah personel

perempuan. Personel perempuan akan ditempatkan di lapangan untuk tugas sosialisasi PERDA, pendekatan pada masyarakat, dan bersifat humanis.

Menurut Francisca (2015), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda menggunakan komunikasi interpersonal sebagai salah satu strategi komunikasi yang dianggap efektif melalui tatap muka langsung "*face to face*" kepada pedagang kaki lima (PKL) yang kemungkinan terjadinya gangguan ataupun kurang pengertian terhadap penyampaian pesan sangat kecil jika dibandingkan dengan menggunakan surat edaran ataupun selebaran.

Untuk itu peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terutama dalam bentuk komunikasi interpersonal kepada pedagang kaki lima (PKL) untuk menumbuhkan kesadaran, wawasan, dan untuk menumbuhkan ketaatan pedagang kaki lima (PKL) terhadap Peraturan Daerah (PERDA) juga menyelenggarakan fungsi sebagai unsur pengamanan dan pembantu walikota dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan penertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Hal yang terpenting sekarang yang dilakukan oleh Satpol PP ialah melakukan tugas dengan baik sesuai dengan tujuan tanpa menggunakan kekerasan melainkan melakukan komunikasi interpersonal kepada masyarakat khususnya para pedagang kaki lima (PKL) yang memanfaatkan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi, untuk sekarang ini komunikasi interpersonal kepada para pedagang bukan menjadi pilihan utama.

Menurut Anggiyowati (2014), aparat Satpol PP harus dibekali dengan keterampilan dan kemampuan teknis agar mampu mengomunikasikan peraturan yang berlaku pada masyarakat. Karena dengan komunikasi inilah Satpol PP bisa

diterima oleh kalangan masyarakat. Mampu bekerja sama, memiliki rasa tanggung jawab dengan pekerjaan masing-masing tanpa adanya kekerasan ataupun tindakan yang mengakibatkan kerusuhan atau bentrok yang terjadi diantara kedua belah pihak yang bersangkutan.

Hal itu dikarenakan sikap menentang para masyarakat atau pedagang yang sudah nyaman dengan kebijakan serta fasilitas negara yang dipakai secara ilegal dan menyebabkan terjadinya kekerasan sampai seringkali melukai kedua belah pihak. Menurut Maulana (2015), saya yakin para bapak petugas Satpol PP tidak akan secara sengaja melakukan kekerasan tersebut, begitupun dengan PKL, pasti memiliki alasan untuk tetap jualan di area terlarang tersebut.

Peristiwa yang seharusnya tidak terjadi, bisa bahkan akan sering dialami jika pola komunikasi yang dilakukan oleh para Satpol PP kurang tepat. Untuk itu, penulis lebih menekankan pada cara Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengantisipasi adanya penolakan ataupun cara Satpol PP sendiri dalam mengkomunikasikan kepada masyarakat khususnya para PKL yang sebenarnya butuh perhatian khusus dari pemerintah.

Cara atau pola komunikasi tersebutlah yang akan diteliti apakah memiliki banyak keuntungan agar mengurangi dampak kekerasan yang terjadi antara Satpol PP dengan masyarakat khususnya para PKL sendiri. Upaya penertiban yang dalam hal ini menjadi tugas yang diemban petugas Satpol PP, semestinya dilakukan dengan manusiawi, lebih menggunakan pendekatan komunikasi persuasif.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, pertanyaan penelitiannya yaitu “bagaimana cara komunikasi interpersonal pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ?”

B. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendiskripsikan pola komunikasi interpersonal pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

C. Manfaat Penelitian

Dari berbagai hal yang telah diungkapkan di atas, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya psikologi sosial dengan menerapkan hasil penelitian sebagai tambahan informasi mengenai cara komunikasi interpersonal pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Diharapkan dapat memberikan gambaran tentang peranan Satpol PP dalam pola komunikasi interpersonal.

b) Bagi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Untuk memberikan informasi tentang peranan yang dilakukan oleh anggota Satpol PP serta meningkatkan komunikasi interpersonal antara anggota dengan kepala Satpol PP.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan sebagai referensi atau bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait Komunikasi Interpersonal pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).